

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan gizi yang saat ini banyak dihadapi oleh anak-anak di seluruh Indonesia adalah tingginya prevalensi balita dengan tinggi badan dibawah standar usia mereka yang dikenal sebagai stunting (Kartinah, 2020). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh anak, hal ini terjadi karena kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhannya (Rahmasari & Wicaksono, 2022). Umumnya anak yang menderita stunting akan terlihat proporsional, akan tetapi jika dibandingkan dengan teman seusianya dia akan terlihat lebih pendek atau terlihat lebih kerdil (Mauludiyah, Handriyanti, & Nurfitri, 2022). Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi perhatian besar di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Anak dikatakan stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh World Health Organization (UNICEF, WHO, & World Bank Group, 2019).

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang terintegrasi dengan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat berada pada angka 21,5% (Tarmizi, 2023). Penurunan prevalensi stunting ini berturut-turut terjadi selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2023. Meskipun demikian angka tersebut masih belum memenuhi target RPJMN 2020-2024, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ambang batas toleransi yang ditetapkan WHO yaitu di bawah 20% (Kemenkes RI, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan masalah gizi khususnya stunting perlu ditingkatkan menyeluruh.

Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, Jember tercatat memiliki angka stunting tertinggi di provinsi tersebut, yaitu sebesar 34,9% (Solichah, 2024). Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, prevalensi

stunting di Kabupaten Bondowoso mencapai 32%, sedangkan di Kabupaten Lumajang sebesar 23,8%. Namun, pada tahun 2024, berkat berbagai intervensi dan program pemerintah Jember, angka ini berhasil diturunkan menjadi 29,7% (Nawawi, 2024). Meskipun demikian, Kabupaten Jember tetap berada di posisi keempat daerah prevalensi tertinggi se-Jawa Timur (Nawawi, 2024). Penurunan angka prevalensi stunting tersebut mencerminkan besarnya komitmen pemerintah dalam menangani masalah stunting. Namun, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan jember bebas stunting atau zero case (Rahmasari & Wicaksono, 2022).

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagai landasan hukum local untuk mendukung upaya ini. Regulasi ini bertujuan mempercepat pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan terkoordinasi yang melibatkan pemerintah, Pendidikan, sector swasta, lembaga kesehatan dan masyarakat (Rahmasari & Wicaksono, 2022). Pendekatan terintegrasi yang dimaksud bahwa upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara terintegrasi yakni melibatkan lintas sektor. Peraturan ini juga membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung upaya percepatan pencegahan stunting baik melalui dukungan finansial, keterlibatan dalam program-program sosial maupun penyediaan fasilitas penunjang.

Pada tingkat daerah, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, stunting menjadi prioritas karena tingginya prevelensi dan kompleksitas factor penyebabnya, seperti keterbatasan akses makanan bergizi, rendahnya edukasi pola asuh, ekonomi menengah ke bawah, serta sanitasi buruk yang meningkatkan rsisko infeksi pada (Fadillah, Pramesti, & Qudsi, 2024). Pemerintah sukorambi telah menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi prevalensi angka stunting. Angka stunting di Kecamatan Sukorambi telah mengalami penurunan drastis tahun ini. Pada bulan februari 2023, prevalensi stunting di Sukorambi masih berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 19% (Pemkab Jember, 2024). Namun berkat berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang berkolaborasi dengan pihak swasta, angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Pada bulan

September 2024, angka stunting di Sukorambi turun menjadi 6,1% (Pembek Jember, 2024). Jadi, saat ini hanya terdapat 166 balita stunting sekecamatan Sukorambi. Hal ini mencerminkan keberhasilan dari program-program yang diterapkan secara berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan Camat Sukorambi bahwa penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang meliputi Puskesmas, Kapolsek, Koramil, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa, pihak swasta, serta seluruh masyarakat di lima desa sekecamatan Sukorambi (Hakim, 2024). Mereka secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan tumbuh kembang anak-anak di Kecamatan Sukorambi berlangsung dengan optimal. Dukungan yang konsisten dari seluruh elemen masyarakat sangat membantu dalam mencapai hasil yang signifikan ini. Hasil ini juga menjadi bukti bahwa dengan kerja sama yang solid dan strategi yang tepat, target penurunan stunting dapat dicapai lebih cepat dari yang diharapkan. Pemerintah Sukorambi berharap besar dengan adanya strategi-strategi yang telah dilaksanakan dapat menjadikan Sukorambi bebas dari stunting atau zero stunting di tahun yang akan datang (Pembek Jember, 2024).

Meskipun upaya *collaborative governance* di Kecamatan Sukorambi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting, proses kolaborasi lintas sektor ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Koordinasi antar aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sering kali menghadapi kendala seperti perbedaan prioritas, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta potensi miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat sebagai mitra aktif masih bervariasi, di mana sebagian keluarga mungkin menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya gizi atau stigma sosial terkait stunting. Faktor budaya lokal, seperti pola asuh tradisional atau kepercayaan tertentu tentang nutrisi, juga dapat memengaruhi penerimaan program intervensi. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya bergantung pada komitmen aktor, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatasi kompleksitas dinamika sosial dan organisasi di lapangan.

Lebih lanjut, keberlanjutan program percepatan penurunan stunting di Sukorambi masih menjadi perhatian penting. Keberhasilan saat ini, seperti penurunan stunting menjadi 6,1%, sebagian besar didukung oleh intervensi intensif dari pemerintah dan kontribusi sektor swasta seperti Mora Group melalui program CSR. Namun, ketergantungan pada sumber daya eksternal menimbulkan risiko jika dukungan ini berkurang di masa mendatang. Selain itu, kapasitas lokal, seperti kesiapan kader posyandu atau Tim Pendamping Keluarga, perlu terus diperkuat untuk memastikan program tetap berjalan efektif tanpa intervensi eksternal yang besar. Konteks geografis Sukorambi, yang meliputi akses terbatas ke pasar untuk makanan bergizi di beberapa desa, juga memperumit upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana *collaborative governance* dapat mengatasi tantangan tersebut guna mencapai target zero stunting yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada dasarnya penanganan stunting memerlukan koordinasi lintas sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Nisa, 2018). Dengan demikian, upaya dalam percepatan penurunan stunting tidak akan mungkin diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan Sukorambi sendiri saja. Pasti pemerintah Kecamatan Sukorambi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan stunting yang tak kunjung usai tersebut. Pengentasan stunting perlu dilakukan secara konvergensi yang berarti melakukan aksi bersama secara terpadu dan saling terhubung antar program baik yang sifatnya fisik pembangunan infrastruktur kesehatan maupun berkenaan dengan program pemberdayaan kesehatan serta edukasi kepada masyarakat (Saufi, 2021). Dengan demikian, Pemerintah Kecamatan Sukorambi mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Berbagai instansi terkait dilibatkan untuk memastikan pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Sukorambi berkolaborasi dengan pihak swasta yaitu Mora Group melalui dukungan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan menyediakan makanan. Adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat

menggambarkan bahwa Kecamatan Sukorambi berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung upaya penurunan stunting secara berkelanjutan sejalan dengan target pembangunan daerah dan nasional.

Penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terpadu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendekatan *collaborative governance* mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang bertujuan mewujudkan manfaat bagi semua pihak sesuai dengan nilai-nilai normatif (Wicaksono, 2021). Pada konteks ini, pemerintah berperan sebagai penggerak utama untuk menginisiasi kolaborasi lintas sektor, sedangkan sektor swasta memberikan dukungan berupa sumber daya dan kontribusi makanan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Sementara masyarakat, sebagai penerima manfaat langsung dilibatkan untuk memastikan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada penelitian ini, fokus pembahasan yang akan diteliti adalah keterlibatan multisektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Stunting sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang kompleks memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menyoroti strategi pemerintah Sukorambi dalam mengurangi prevalensi stunting melalui pendekatan kolaborasi multisektor. Pendekatan ini melibatkan pemerintah kecamatan Sukorambi, sektor swasta Mora Group, dan masyarakat setempat untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam melaksanakan program intervensi stunting. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana proses kolaborasi multisektor ini berjalan. Dengan demikian, peneliti mengambil judul "*Collaborative Governance* melalui Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2024".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan bagaimana peran setiap aktor pada proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sukorambi dan menganalisis peran setiap aktor dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini akan sangat membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang tata kelola pemerintahan kolaboratif khususnya dalam konteks penurunan stunting. Kemudian peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi tentang *collaborative governance*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi penting bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk mempelajari tata kelola kolaboratif di daerah lain, sehingga membantu memperluas wawasan tentang efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yakni untuk memberikan informasi yang dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Sukorambi dalam mengoptimalkan pendekatan *collaborative governance* untuk penurunan permasalahan stunting. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi kecamatan lain dalam menerapkan pendekatan *collaborative governance* untuk menyelesaikan permasalahan stunting.